

PENYANDERAAN (*GIJZELING*) TERHADAP WAJIB PAJAK PRIBADI

YANG TIDAK KOOPERATIF

(Perspektif UU Nomor 19 Tahun 2000 *jo* UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Hukum Islam)

SKRIPSI

Oleh:

MUDAWAMAH

NIM 11220079



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan skripsi dengan judul:

**PENYANDERAAN (*GIJZELING*) TERHADAP WAJIB PAJAK PRIBADI
YANG TIDAK KOOPERATIF
(Perspektif UU Nomor 19 Tahun 2000 *jo* UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Hukum Islam)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 Februari 2015
Penulis

Mudawamah
NIM 1122009

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mudawamah NIM: 11220079 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENYANDERAAN (*GIJZELING*) TERHADAP WAJIB PAJAK PRIBADI
YANG TIDAK KOOPERATIF
(Perspektif UU Nomor 19 Tahun 2000 *jo* UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Hukum Islam)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 2 Februari 2015

Dosen Pembimbing

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, M.Ag.
NIP 19691024 199503 1 003

Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
19780524 200912 2 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mudawamah, NIM 11220079, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENYANDERAAN (*GIJZELING*) TERHADAP WAJIB PAJAK PRIBADI
YANG TIDAK KOOPERATIF
(Perspektif UU Nomor 19 Tahun 2000 *jo* UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Hukum Islam)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (sangat memuaskan)

Dengan penguji :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. H. Khoirul Anam, Lc, MH | (_____) |
| NIP. 19680175 200003 1 001 | Ketua |
| 2. Khoirul Hidayah, SH.,MH | (_____) |
| NIP. 19780524 200912 2 003 | Sekretaris |
| 3. Dr. Noer Yasin, M.HI | (_____) |
| NIP. 19611118 200003 1 001 | Penguji Utama |

Malang, 12 Februari 2015
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 19680902000031001

MOTTO

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

" supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya"

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Nya serat hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul ***“Penyanderaan (Gijzeling) Terhadap Wajib Pajak Pribadi Yang Tidak Kooperatif (Perspektif UU Nomor 19 Tahun 2000 jo UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Hukum Islam)”*** dapat diselesaikan dengan surahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Mohammad Nur Yasin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, sara, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Untuk kedua orang tuaku tercinta, Alm. Mudakir dan Masriatun yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, dan doanya.
9. Kakak-kakakku, Mas Soim, Mas Gufron, dan Mbak A'yun yang juga selalu memberikan motivasi serta dukungannya.
10. Teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2011, terima kasih atas dukungannya.

11. Pengasuh PPAP Nurul Ummah, Bapak Sabilal Rosyad dan Ibu Aminatus Zahro yang telah memberikan bimbingan selama penulis berada di Malang.
12. Teman-teman PPAP Nurul Ummah yang telah memberi semangat dan dukungannya.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 2 Februari 2015

Penulis,

Mudawamah

NIM 11220079

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak Dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k

¹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah 2013

ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î misalnya قبل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam kitabnya muqaddimah menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Namun, apabila kata tersebut menggunakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu menggunakan transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
F. Metode Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	

A. Tinjauan Umum tentang Pajak	18
1. Pengertian Pajak	18
2. Utang Pajak	22
3. Penagihan Pajak	25
4. Hukum Pajak Ditinjau dari Hukum Perdata	27
5. Hukum Pajak Ditinjau dari Hukum Administrasi	28
6. Hukum Pajak Ditinjau dari Hukum Pidana	29
B. Tinjauan Umum tentang <i>Gijzeling</i>	30
1. Sejarah <i>Gijzeling</i>	30
2. Pengertian <i>Gijzeling</i>	34
3. <i>Gijzeling</i> dalam Pajak	36
4. Prosedur <i>Gijzeling</i>	40
C. Tinjauan Umum tentang Pajak dalam Hukum Islam	52
D. Tinjauan Umum tentang Ta'zir	58

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyanderaan (<i>Gijzeling</i>) terhadap Wajib Pajak Pribadi yang Tidak Kooperatif Perspektif Hukum Pajak di Indonesia	62
B. Penyanderaan (<i>Gijzeling</i>) terhadap Wajib Pajak Pribadi yang Tidak Kooperatif Perspektif Hukum Islam	89

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN 104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ketentuan *Gijzeling* di Indonesia

Tabel 3.1 Perbandingan Konsep *Gijzeling* dalam Hukum Perdata dan Hukum Pajak

Tabel 3.2 Perbandingan *Gijzeling* dengan Sanksi Pidana Pajak

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 UU Nomor 19 Tahun 1997

Lampiran 2 UU Nomor 19 Tahun 2000

Lampiran 3 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000

Lampiran 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2000

Lampiran 5 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 294/Kmk.03/2003, M-02.Um.09.01 Tahun 2003

Lampiran 6 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-218PJ/2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi
Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera

ABSTRAK

Mudawamah, 11220079, *Penyanderaan (Gijzeling) terhadap Wajib Pajak Pribadi yang tidak Kooperatif (Perspektif UU Nomor 19 Tahun 2000 jo UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Hukum Islam)*, Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Gijzeling*, Hukum Pajak, Hukum Islam

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. *Self Assessment System* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak kooperatif. Salah satunya adalah dengan menerapkan penyanderaan (*gijzeling*) yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana konsep penyanderaan (*gijzeling*) terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif menurut hukum pajak di Indonesia? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyanderaan (*gijzeling*) wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *gijzeling*. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan mengkaji konsep-konsep *gijzeling* dalam hukum pajak maupun dalam hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *gijzeling* dalam hukum pajak memiliki konsep yang sama dengan *gijzeling* dalam hukum perdata. Hal ini mengingat bahwa hukum pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang. Selain itu, *gijzeling* juga mirip dengan sanksi pidana yaitu sama-sama mengekang kebebasan seseorang. Meskipun memiliki beberapa kesamaan konsep dengan hukum perdata maupun pidana, *gijzeling* dalam hukum pajak termasuk hukum administrasi karena dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat negara yaitu Ditjen Pajak sebagai upaya terakhir penagihan pajak. Penerapan *gijzeling* dalam hukum pajak ini diperbolehkan menurut hukum Islam dengan memperhatikan aspek kemaslahatan, yaitu untuk memperlancar pemasukan kas negara. Di dalam hukum Islam, *gijzeling* dikenal dengan istilah *al-Habs* (penahanan). *Al-Habs* merupakan salah satu bentuk hukuman ta'zir yang ditentukan oleh penguasa. *Al-Habs* bisa diterapkan kepada seseorang agar memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana konsep *gijzeling* dalam hukum pajak yaitu dengan menahan sementara wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melunasi utang pajak.

ABSTRACT

Mudawamah, 11220079, Hostage to Uncooperative Private Taxpayer (Perspective of Law No. 19 Year 2000 jo Law No. 19 of 1997 on Tax Billing with Forced Letter and Islamic Law). Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Keywords: Hostage, Tax Law, Islamic Law

Taxation in Indonesia uses the Self Assessment System that gives full credence to the taxpayer to calculate, deposit and report tax obligations. Self Assessment System allows the potential of the taxpayer does not pay off the tax obligations. Therefore, it needs to take the effort of law enforcement to uncooperative taxpayer. One way is to apply an hostage as stipulated in Law No. 19 of 1997 about Tax Billing with Forced Letter as amended by Act No. 19 of 2000.

In this study, there are two formulations of the problem, they are: 1) How does the concept of hostage to uncooperative personal taxpayer in accordance with the tax laws in Indonesia? 2) How is the view of Islamic law to hostage to uncooperative personal taxpayer? This study is a normative juridical research. It uses statute approach by reviewing legislation relating to hostage. It also uses conceptual approach by reviewing the concepts of hostage in tax law or Islamic law.

The results of this study indicate that the concept of hostage in tax law has the same concept with hostage in civil law. It is given that the tax law is an engagement by legislation. In addition, hostage is also similar to criminal sanction because they both restrain someone freedom. Although it has some similarities with the concept of civil and criminal law, hostage in tax law belongs to administrative law because it is based on Hostage Warrant issued by state official, the Directorate General of Taxation, as the last effort of tax billing. The application of hostage in tax law is permissible under Islamic law by considering benefit aspect, which is to facilitate the treasury funds income. In Islamic law, hostage is known as *al-Habs* (detention). *Al-Habs* is one of ta'zir punishment determined by the authority. *Al-Habs* can be applied to a person in order to meet his obligation. This is as hostage concept in tax law to arrest the taxpayer temporary in order to pay off the tax debt.

ملخص البحث

مدوامة، ١١٢٢٠٠٧٩، رهينة لضرائب الفردي غير متعاونة (نظرًا عن القانون رقم ١٩ عام ٢٠٠٠ جو القانون رقم ١٩ عام ١٩٩٧ بشأن الفواتير الضريبية مع رسالة القسري والشرعية الإسلامية). البحث، قسم القانون الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: خير الهداية الماجستير

الكلمات الرئيسية : رهينة، قانون الضرائب، قانون الإسلامي

الضرائب في إندونيسيا تستخدم نظام التقييم الذاتي الذي يعطي تصديقًا كاملاً لدافعي الضرائب لحساب والودائع وتقديم تقرير الالتزامات الضريبية. نظام التقييم الذاتي يتيح إمكانيات دافعي الضرائب لا تسديد الالتزامات الضريبية. ولذلك، فإنه يحتاج إلى جهد يأخذ من إنفاذ القانون لدافعي الضرائب غير متعاون. لذلك يحتاج طريق واحد هو تطبيق رهينة كما هو منصوص عليه في القانون رقم ١٩ عام ١٩٩٧ حول الفواتير الضريبية مع رسالة القسري بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم ١٩ عام ٢٠٠٠.

في هذا البحث، هناك سؤالين، وهي: (١) كيف مفهوم رهينة لضرائب الفردي غير متعاون وفقا لقوانين الضرائب في إندونيسيا؟ (٢) كيف حكم رهينة لضرائب الفردي غير متعاون في الإسلام؟ هذا البحث هو بمنهج قانوني المعايير. تستخدم هذا البحث المنهج الأساسي بخلاف مراجعة التشريعات المتعلقة الرهائن. يستخدم هذا البحث أيضا المنهج المفاهيمي بخلاف مراجعة مفاهيم رهائن في قانون الضرائب أو القانون الإسلامي.

نتائج هذا البحث تشير إلى أن مفهوم رهائن في قانون الضرائب له نفس المفهوم مع رهائن في القانون المدني. وبسبب قانون الضرائب هو المشاركة عن طريق التشريع. وبالإضافة إلى ذلك، رهينة هو أيضا متساوياً بعقوبة جنائية لأن كلا منهما كبج حرية لشخص. على الرغم من أنها لديها بعض أوجه التشابه مع مفهوم القانون المدني والجنائي، رهينة في قانون الضرائب ينتمي إلى القانون الإداري يقوم على أساس أنه أمر الرهائن صادرة عن مسؤول في الدولة، والمديرية العامة للضرائب، وهذا الجهد الأخير من الفواتير الضريبية. تطبيق رهائن في قانون الضرائب جائز في الشريعة الإسلامية من خلال النظر في الجانب صالح، وهو تيسير الدخل أموال الخزينة. في الشريعة الإسلامية، كما هو معروف رهينة الحبس (الاعتقال). الحبس هو واحدة من العقاب التعزيز تحدده بالسلطان. الحبس يمكن تطبيقه على شخص من أجل تلبية التزاماته. وهذا هو ما مفهوم رهائن في قانون الضرائب لإلقاء القبض على دافعي الضرائب مؤقت في أودر لتسديد الديون الضريبية.